

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO.2 TAHUN 2002
TENTANG HAK PILIH ANGGOTA POLRI
DALAM PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu syari'ah



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PUJI RAHAYU
NPM : 1321020072
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO.2 TAHUN 2002 TENTANG HAK PILIH ANGGOTA POLRI DALAM PEMILU

**Oleh :
Puji Rahayu**

Warganegara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, oleh sebab itu tidak boleh ada suatu diskriminasi terhadap hak-hak warganegara. Pasal 28 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa polri tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan dilarang untuk melibatkan diri dalam dunia politik dikarenakan harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh partai politik. Dalam hal ini melanggar hak konstitusional sebagai warganegara, karena sebagai warganegara memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana hak pilih anggota Polri dalam pemilu menurut Undang-undang no. 2 Tahun 2002, dan bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap hak pilih Polri dalam pemilu menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hak pilih anggota Polri dalam pemilu menurut Undang-Undang no. 2 Tahun 2002, dan Untuk mengetahui sudut pandang Fiqh Siyasah terhadap hak pilih Polri pemilihan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan, yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pasal 28 Undang – Undang No. 2 tahun 2002 telah menjelaskan bahwasannya anggota Polri tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, melibatkan diri dan bersikap netral, bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota dan, atau pengurus partai politik. Dalam pandangan fiqh siyasah dijelaskan bahwa setiap rakyat suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai dengan syariat Islam. Hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan melalui hak dalam pemberian suara, hak memilih dalam pemilihan, dan kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UU NO.
2 TAHUN 2002 TENTANG HAK PILIH
ANGGOTA POLRI DALAM PEMILU.
Nama : PUJI RAHAYU
NPM : 1321020072
Jurusan : Siyasah syari'yyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.
NIP: 195808171993031002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M. H
NIP: 197512302003121002

Ketua Jurusan,

Drs. Susiadi AS., M. Sos.I
NIP: 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG HAK PILIH
ANGGOTA POLRI DALAM PEMILU** disusun oleh Puji Rahayu,
Npm : 1321020072, Program Studi : Siyasah, telah diujikan dalam
sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
Pada hari/tanggal : Jum'at, 08 Desember 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

(.....)

Sekretaris : Arif Fikry, S.H.I., M.Ag

(.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

(.....)

Penguji II : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

(.....)

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“ Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

(Q.S Shaad (38) : 26)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, serta hormat tak terhingga kepada :

1. Ibu tercinta, atas segala pengorbanan dan kasih sayang juga dukungan.
2. Kakak dan adik tercinta, atas kasih sayang dan pengertian.
3. Seluruh rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu.
4. Almamater tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Puji Rahayu dilahirkan di Lampung Barat, pada 21 Maret 1995, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan yang bernama Rosmawati dan Zuni Azhari. Penulis mengawali pendidikan dari :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Di Tambak jaya, Lampung Barat dan diselesaikan pada 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Way Tenong, Lampung Barat diselesaikan pada 2010.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Way Tenong, Lampung Barat. Diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil studi Siyasah pada Fakultas Syariah.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag. ,M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah banyak membantu memberikan saran, dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. selaku Dosen Pembimbing I, dan ketua jurusan siyasah yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Eko Hidayat, S.Sos., M. H selaku Dosen Pembimbing II, yang tidak lelah untuk membimbing dan memberikan banyak masukan, saran-saran dalam penulisan skripsi ini dengan sabar dan penuh kasih sayang.
4. Seluruh staf yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam menjalankan studi dan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh staf akademik dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak membantu, membina, dan mengantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.

6. Ibunda Rosmawati, Spd.I yang sangat-sangat penulis hormati dan sayangi, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kakakku Resti Zurisma Putri, Spd.I , Puji Astuti, SP dan Adikku Muhamad Roy Zulkifli, Pamanku Sulaiman, SP. ,M.M yang selama ini terus memberikan semangat, doa dan kasih sayang.
8. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.
9. Teman-teman seperjuangan Luciyana Andriyan Saputri, S.H, Dewi Fortuna dm, S.H, Nur Laila, S.H, Vivi Anggih Kariza, S.H, dll. terima kasih atas ide-ide cemerlang, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai kebanggan tersendiri bagi penulis memiliki teman seperti kalian semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terimakasih.

Bandar lampung, Juli 2018
Penulis

Puji Rahayu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14

BAB II HAK PILIH MENURUT FIQH SIYASAH

A. Fiqh Siyasah	18
B. Pengertian Hak Politik Menurut Fiqh Siyasah.....	21
C. Dasar Hukum Hak Politik.....	30
D. Hak Pilih Menurut Fiqh Siyasah	33

BAB III HAK PILIH POLRI TERHADAP UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2002

A. Pengertian Hak Pilih Dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2002.....	38
B. Latar Belakang Lahirnya Undang –Undang No. 2 Tahun 2002	41
C. Kedudukan Polri Dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2002	47
D. Hak Polri Memilih dan Dipilih Menurut Undang – Undang No. 2 tahun 2002	50

**BAB IV PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG -
UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG HAK PILIH
ANGGOTA POLRI DALAM PEMILU**

- A. Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu Menurut Undang- Undang
No. 2 Tahun 2002.....55
- B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Polri Dalam Pemilu
Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran..... 65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Fiqh Siyasah

Fiqh dalam bahasa arab, berarti paham atau pengertian. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunah nabi yang di rekam dalam kitab-kitab hadis.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) hlm 951.

Menurut istilah Fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang di susun oleh mujttahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Menurut Ibnu al-Qayim yang di nukilnya dari Ibn Aqil mengatakan: "Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukannya".

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.²

3. Hak pilih anggota Polri³

Hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratik, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Hak memilih adalah keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah tersebut. Dalam sejarah pengaturan bagi Polri dibidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah

²J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 22-24.

³J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 60.

menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan. Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara.⁴

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu” adalah memecahkan dan menguraikan suatu materi atau informasi tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang anggota Polri yang tidak di beri hak pilih dalam pemilu dan apa pertimbangan pemerintah tidak mengizinkan Polri untuk tidak mengikuti pemilu.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu” ini yaitu :

⁴HenryRaymond & Singgih Agung, *Politik kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, Erlangga Jakarta, 1999, hlm 16.

1. Penulis ingin Mengetahui dan memperjelas apakah hak pemilu aparat kepolisian akan terus di tetapkan bahwa aparat kepolisian tidak boleh memilih dalam pemilu, sedangkan pemilu adalah hak setiap orang yang tercatat identitasnya di negara Indonesia ini.
2. Penelitian tentang hak pilih anggota Polri dalam pemilu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Siyash UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan sehingga penulis dapat mengkaji lebih jauh kesenjangan-kesenjangan tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah memilih wakil rakyat, yang menjadi sorotan utama yaitu perkara yang di wakikan yakni untuk melakukan aktivitas akad perwakilan yang di laksanakan. Dengan kata lain, aktivitas para wakil rakyat seharusnya sesuai dengan syariah islam maka wakalah boleh di lakukan, sebaliknya jika tidak sesuai maka wakalah tersebut menjadi batil dan karnanya haram di lakukan.

Dalam pandangan hukum islam pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah). Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang di wakikan (dalam hal ini pihak ke dua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua

resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Dalam Islam apapun yang bisa melahirkan keadilan, maka bagian dari politik harus sesuai dengan syariah.

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting : Legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah/penguasa di kukuhkan karena ia adalah hasil pilihan warga negara yang memiliki kedaulatan. Keberadaan serta kebijaksanaan yang dibuat pemerintah akan memperoleh dukungan dan sanksi yang kuat karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan karna pemaksaan dari atas.

Melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat di lakukan secara lebih adil karna keterlibatan warga negara. Dengan pemilu pula maka akan terjadi pergantian *elite* kekuasaan secara lebih adil karna warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih di anggap memenuhi sebagai *elite* dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung, ini berarti pula bahwa pemilu adalah alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah yang terakhir itu masih di percayai atau tidak.

Pemilu adalah sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan bahwa warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung sebagaimana selayaknya seorang

warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Ia akan mengerti dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya.⁵

Begitu juga yang di syariatkan oleh *nash-nash* lain dari asas-asas syariat islam yang berhubungan dengan kehidupan politik umat, yaitu prinsip “tidak menyetujui kezaliman”. Mengandung pengukuhan atas hak partisipasi rakyat dalam urusan hukum pemerintahan, ini adalah hak yang di tetapkan berdasarkan prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh *nash-nash* Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang shahih sebagai kewajiban keislaman atas para penguasa dan rakyat. Para penguasa dan khalifah harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, berlandaskan rasa tanggung jawab individual dan rasa solidaritas untuk mewujudkan tujuan-tujuan syara, menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil.⁶ yang ada dalam firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa': 58).⁷

⁵HenryRaymond & Singgih Agung, *Politik kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di indonesia*, Erlangga Jakarta, 1999, hlm 16-17

⁶Fariq Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Sinar Grafika 2005, hlm 5

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta, Bumi restu, 2001Q.S An Nisa:58

Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana dan maha adil tidak akan mengkhususkan cara berlaku adil dan tanda-tandanya pada satu sesuatu saja dan menafikan apa yang lebih kuat petunjuknya dan lebih jelas tandanya. Bahkan Allah SWT telah menjelaskan apa yang telah dia syariatkan dari cara dan sarana berlaku adil, bahwa tujuan dari semua itu adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hambanya dan agar manusia berlaku adil antara sesama mereka. Artinya, cara dan sarana apa saja yang dapat menciptakan keadilan maka itu sesuai dengan agama dan tidak menyalahinya.⁸

Dalam pembahasan tentang berlaku adil bahwa persamaan hak adalah tujuan di utusnya para rasul dan di turunkannya syariat juga hukum. Persamaan hak juga merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Berlaku adil adalah sistem Allah dan syariatnya, juga merupakan sistem segala sesuatu.

Oleh karena itu prinsip musyawarah merupakan salah satu tuntutan. Kami juga berkata bahwa prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan makhluknya, putih atau hitam, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Persamaan hak juga termasuk tuntutan keadilan Allah dan kebijaksanaannya pada makhluknya, atau satu gambaran dari beberapa gambarannya. *Nash-nash* Al-quran dan hukum-

⁸Fariq Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Sinar Grafika 2005, hlm 205

hukum nya telah menuturkan dengan menetapkan “persamaan hak” sesempurna-sempurnanya. Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, di dalam surah-surah makkiyah dan madaniyah dan adil dalam bahasa artinya penyamarataan.

Sedangkan dalam pasal 28 Undang - Undang RI No.2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Isi pasal 28 Undang - Undang RI No.2 tahun 2002, sama halnya bahwa hak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam pemilu telah di cabut atau ditiadakan, sedangkan persamaan hak dalam setiap sistem hukum demokrasi di anggap sebagai rukun inti di dalamnya, sebab ia mencakup hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar bagi individu. Ia juga selalu beriringan dengan prinsip kebebasan, tidak pernah terpisah, hingga persamaan hak dan kebebasan itu menjadi makna yang langsung

terbayang dalam benak tentang demokrasi, di setiap tempat dan setiap manusia.

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan dalam negara, atau hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara. Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, salah satunya hak memilih, semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan), siapa yang terpilih dijabat ini, maka ia adalah kepala negara, dalam syara' di sebut bai'ah dan hak bai'ah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau perempuan.⁹

Hak dipilih sebagai pemenuhan Hak asasi Manusia, ketentuan ini diatur didalam pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa¹⁰:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan

⁹ Ahmad Muflih Sefuddin, *Op.*, Cit hlm 17

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, tahun 1999, pasal 43

bebas, menurut cara yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan .

3. Setiap warga negara dapat di angkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Persamaan hak dalam sistem-sistem demokrat adalah persamaan hak yang berkenaan dengan undang-undang atau sipil dan di kenal demokrasi politik. Namun, maksud itu tidak berlangsung lama bersama pertumbuhan pemikiran sosialis apalagi setelah perang Dunia II, ia mengarahkan perhatiannya kepada hak-hak sosial, setelah ia terfokus hanya pada hak-hak politik saja.¹¹

Hak untuk memilih merupakan hak perdata warga negara, demikian juga hak untuk berpendapat, masyarakat atau negara tidak dapat membatasi hak itu dengan melarang, mengkriminalkan atau menjatuhkan sanksi moral terhadap orang yang tidak menggunakannya.” Bahkan hak memilih tersebut tercantum secara resmi dalam Undang - Undang No. 39/1999 tentang HAM, yaitu di pasal 43 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu”. Pernyataan serupa juga terdapat dalam Undang - Undang No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, yaitu di pasal 25 yang berbunyi: “Hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih.”¹²

¹¹ Fariq Abdul Khaliq, *Op, Cit*, hlm 221-228

¹² I Ketut Putra Erawan, *Logika Perubahan dan Keterampilan Sistem Pemilihan Umum Bagi Indonesia 2009*, Jakarta, hlm 12

Pengaturan tentang hak pilih Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya di pengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di indonesia dan sejarah hukum dari masing-masing lembaga, dalam pembahasan ini perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang di susun secara kronologis. Dalam hal ini, hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas.¹³

Hukum tumbuh berarti bahwa terdapat hubungan yang erat,sambung-menyambung atau hubungan yang tak terputus-putus antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau. Hukum masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan. Ini berarti bahwa kita dapat mengerti hukum kita pada masa kini, hanya dengan penyelidikan sejarah, bahwa mempelajari hukum secara ilmu pengetahuan harus bersifat juga mempelajari sejarah. Dalam kaitan ini, sejarah pengaturan hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karna usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lampau. Melalui perspektif sejarah, di harapkan mampu menjajaki berbagai aspek politik hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan untuk

¹³ Hasnati, "Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 3 No.1 Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 97

memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita.¹⁴

Berdasarkan perspektif tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih Polri selalui di warnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang di bangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.¹⁵ Hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, Karna pola-pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Untuk memperjelas perjalanan demokrasi dalam perspektif sejarah dan politik hukum terkait dengan hak pilih angkatan bersenjata Polri dapat di cermati dengan penelaahan terhadap 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia yang meliputi Orde lama, Orde baru dan reformasi.

Konsep hak dengan ajektif manusia mempunyai implikasi instrinsik bahwa hak-hak itu dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan secara sama. Seluruh manusia di manapun dan kapanpun karena kemanusiaannya tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, etnis atau afiliasi kesukuan, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideologi, dan komitmen-komitmen lainnya.¹⁶ Hal inilah yang kemudian mengantarkan pada

¹⁴ *Ibid*, hlm. 102-113

¹⁵ Nurhasan, "Pasang surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Ligitasi*, Vol. 6 No.2, Juni 2005, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm 215

¹⁶ Todung Mulya Lubis, "Menegakan Hak asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No.1, Januari-Maret 2009, Jakarta. Fakultas: Hukum Universitas Indonesia, hlm 61

eksistensi hukum dalam negara yang seharusnya memberikan tempat dan hak politik bagi anggota Polri ke dalam kategori *inalienable*, tidak dapat di alihkan, di rampas, atau di ganggu gugat dan *imprescriptible*, tidak dapat hilang, betapapun telah di gerogoti atau gagal dalam pemenuhannya.

D. Rumusan Masalah

Selanjutnya akan menjadi pembahasan atau kajian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana hak pilih anggota Polri dalam pemilu menurut Undang-undang no. 2 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana pandangan Fiqh siyasah terhadap hak pilih Polri dalam pemilu menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan untuk mengadakan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam laporan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hak pilih anggota Polri dalam pemilu menurut Undang-Undang no. 2 Tahun 2002
- b. Untuk mengetahui sudut pandang Fiqh Siyasah terhadap hak pilih Polri pemilihan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik, baik

politik dalam tataran hukum positif maupun hukum politik Islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi masukan bagi penyempurnaan perangkat membuat undang-undang terutama dari golongan politik islam.

- b. Secara praktis, penelitiann ini di tujukan kepada kalangan praktisi hukum positif dan hukum islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat negara agar sekiranya aparat kepolisian bisa mendapatkan hak memilih dalam pemilu, karna satu suara pun sangat di perlukan atau sangat penting bagi calon legislatif.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka di perlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang di anggap penulis paling baik untuk di gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang di laksanakan dengan menggunakan literatur (*kepustakaan*) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang di gunakan sebagai data

primer.¹⁷ Kemudian Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang di maksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh.¹⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian dalam hal objek yang akan di teliti atau di gambarkan ketika permasalahan terjadi. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Kitab Fiqh, dan Undang-Undang.¹⁹

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer.²⁰

Dalam hal ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitan nya dengan masalah penelitian dan di peroleh dari literatur buku-buku politik, buku-buku, makalah-makalah, majalah artikel

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (bandar lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hlm 10.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hlm 114.

¹⁹ Susiadi, Op, Cit, hlm 75

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 115-116.

internet, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah data primer dan data sekunder dari studi kepustakaan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: studi pustaka di lakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang di perlukan dan inventarisasi bahan yang di butuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²¹

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di mengerti. Analisa ini di

²¹*Ibid*, hlm 126.

pergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas.

Metode induktif adalah mengkaji data melalui proses yang berlangsung dari temuan fakta, kategori analisis yang bersumber dari data, pola-pola, disusun berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, dan saling berhubungan.²²

Metode analisis yang akan di pilih oleh penulis adalah metode deskriptif analitis. Yang di maksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²³ Dalam penelitian ini akan di gambarkan tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu untuk nantinya di tinjau dan di analisa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

²² Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Bandung, 2011) hlm. 47

²³ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (yogyakarta : Paradigma, 2005) hlm.58

BAB II

HAK PILIH MENURUT FIQH SIYASAH

A. Fiqh Siyasah

Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁴

Fikih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata ساس-سياسة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²⁵

Menurut Abd Wahab *Siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.²⁶

²⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 28

²⁵ *Ibid*, Hlm 29

²⁶ *Ibid*, hlm 30

Menurut Abd al-Rahman Taj, *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²⁷

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1). Penguasa atau yang mengatur dan 2). Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Wiryono Prodjodikoro:²⁸ "Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya mengandung peredaan.

Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu khidmah (pelayanan) dan islah (arahan/bimbingan), sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Kemudian siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam a). Siyasah syar'iyah; siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur

²⁷ *Ibid*, hlm 31

²⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco, Bandung 1971, hlm 34

manusia hidup bermasyarakat dan bernegara b). Siyasah wadh'iyah; siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun bernegara.²⁹ Meskipun aplikasi siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah mengandung perbedaan, tentu saja tidak harus diklaim bahwa siyasah syar'iyah harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim. Karena dalam pengalaman empiris, dapat terjadi siyasah wadh'iyah dapat diterima oleh kaum muslimin, seperti Indonesia.

Objek kajian Fiqh Siyasah diantaranya:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.³⁰
2. Menurut Hasbi Ashshiddiqie³¹ objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentakbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap. Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam

²⁹ Ibid, hlm 35

³⁰ H.A Djazuli, *Op, Cit*, hlm 45

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm 30

dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Hasbi kemudian membidangkan objek kajian fiqh siyasah pada delapan bidang, yaitu:³²

1. Siyasah Dusturiyah Syar'iiyyah

Siyasah Dusturiyah Syar'iiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, dan batas pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan penguasa dan rakyat.³³

2. Siyasah Tasyri'iiyyah Syar'iiyyah.

Siyasah Tasyri'iiyyah adalah siyasah yang mengatur tentang kebijaksanaan terhadap penetapan hukum.³⁴

3. Siyasah Qadhaiyyah Syar'iiyyah.

Siyasah Qadhaiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan kebijaksanaan peradilan.

4. Siyasah Maliyah Syar'iiyyah.

Siyasah Maliyah Syar'iiyyah adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber mata air dan perbankan.³⁵

³² Djazuli, *fiqh Siyasah*, Op, Cit hlm 30

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007) hlm 13

³⁴ *Ibid*, hlm 18

³⁵ *Ibid*, hlm 24

5. Siyasah Dawliyah Syar'iyah.

Siyasah Dawliyah Syar'iyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antar negara-negara Islam dan non Islam.³⁶

6. Siyasah Idariyah Syar'iyah.

Siyasah Idariyah adalah siyasah yang mengatur tentang kebijaksanaan administrasi negara.

7. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah Dawliyyah.

Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah Dawliyyah adalah siyasah yang berhubungan luar negeri atau internasional.

8. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah.

Siyasah Tanfidziyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan Politik pelaksanaan undang-undang.

9. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah.

Siyasah Harbiyyah Syar'iyah adalah siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.³⁷

B. Pengertian Hak Pilih Menurut Fiqh Siyasah

Hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratis, penduduk yang usianya diatas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Hak memilih adalah keputusan untuk memilih yang

³⁶ Djazuli, *Op., Cit*, hlm 36

³⁷ *Ibid*, hlm 37

dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah tersebut.³⁸

Hak memilih adalah hak politik yang merupakan salah satu hak rakyat yang harus di berikan dan dijamin oleh negara. Misalnya hak rakyat untuk berkumpul atau berserikat, berpendapat di muka umum dan turut serta dalam pemerintahan. Adanya pemenuhan dan jaminan hak-hak dasar rakyat termasuk hak politik merupakan suatu ciri sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu suatu pemerintahan yang melibatkan peran rakyat dan tidak memasung kehendak rakyat karena pada hakikatnya demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara,³⁹ atau hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara.

Pemilu merupakan suatu hal yang penting dan menyangkut hajat orang banyak, masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah “*mata’ummu bihil balwa*” atau perkara yang menimpa masyarakat luas, bahkan di beberapa negara dulunya tidak ada pemilihan umum, kini mulai diadakan aturan itu.

³⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 60.

³⁹ A.M Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 17

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Islam mensyaratkan pentingnya sebuah negara atas kekuasaan dan keberadaan seorang pemimpin.⁴⁰

Adapun menurut fatwa MUI, penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum sebagaimana tertera dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se Indonesia III tentang *masaul asasiyyah wathaniyyah* (masalah strategis bangsa) point IV :⁴¹

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin dan wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat islam adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat diatas san sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat adalah haram.

⁴⁰ Ali As-Salus, *Imaman dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm 15

⁴¹ Jurnal Umum, *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat*, 24-26 Januari 2009, hlm 11

Fatwa tersebut menekankan bahwa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, ikut berpartisipasi didalamnya, hal ini agar sejalan dengan harapan pemerintah.

Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, diantaranya :⁴²

1. Hak Memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan). Siapa yang terpilih di jabatan ini, maka ia adalah kepala negara, dalam *syara'* disebut *bai'ah*, dan hak *bai'ah* ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau perempuan.⁴³

2. Hak Musyawarah

Hak musyawarah adalah hak bagi setiap muslim kepada seorang khalifah (kepala negara). Tiap muslim mempunyai hak untuk bermusyawarah di dalam urusan-urusan yang perlu di musyawarahkan oleh kepala negara.⁴⁴

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

⁴² Ahmad Muflih Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 17

⁴³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cetakan I, Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2009, hlm 883.

⁴⁴ Ibnu Al-Jauzi, *Munaqih Umar Ibn Al-Khattab*, Tahqiq: Zainab Ibrahim Al-Qaruth, cet I, hlm 40

Artinya : *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁴⁵ (Q.S Al-Imran : 159)

3. Hak pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksud jika dia menyimpang dari kebenaran. Tahap pertama untuk meluruskannya ialah memberi nasehat dengan ikhlas.⁴⁶

4. Hak Pemecatan

Islam telah memberi hak kepada umat memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hak ini di tegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al-Hambali.⁴⁷

5. Hak Pencalonan dan Pemilihan

Hak pencalonan adalah seseorang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Apakah individu memiliki

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta, Bumi restu, 2001 Q.S Al-Imran : 159

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006, hlm 15

⁴⁷ Ahmad Muflih saefuddin, *Op., Cit* hlm 19.

hak ini dalam pemerintahan islam? Jawabnya boleh, karena Rasulullah telah mengabdikan permintaan Amru Ibnu Ash ketika dia memohon menjadi wali di negeri (wilayah) Oman.⁴⁸

6. Hak Menduduki Jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh perangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan. Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak di capai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan didunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin di capai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tertentu.

Bukan hanya menjunjung tinggi hak umat Islam saja, Islam pun meletakkan hak-hak tertentu bagi non-muslim yang kebetulan hidup dalam lingkungan perbatasan suatu negara Islam dan hak-hak ini di pandang sebagai bagian dari konstitusi Islam. Konstitusi Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan “piagam madinah” adalah sebutan dari shahifat (berarti lembaran tertulis) dan kitab yang dibuat oleh Nabi. Kata “piagam” berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid* , hlm 19

⁴⁹ Jiah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003 hlm 112

Hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan melalui hak dalam pemberian suara, hak memilih dalam pemilihan, dan kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Landasan dasar hak ini dalam Islam yang di kehendaki oleh Allah SWT dan telah di jelaskan oleh rasulullah aalah berkumpul pada enam asas yaitu : kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.⁵⁰

Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal yang terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.⁵¹

Islam merupakan *manhaj* ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W untuk umat manusia agar mereka berada dalam jalan yang benar dan selamat didunia dan akhirat, kepemimpinan Nabi Muhammad dapat dilihat dari praktik- praktik yang dicontohkan Nabi dalam musyawarah dengan para sahabat, dan walaupun beliau seorang pemimpin, akan tetapi beliau tidak bersikap otoriter terhadap para sahabat dan kaum Muslimin. Beliau memberikan dan menjamin hak – hak warga masyarakat termasuk hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan (politik).⁵²

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta Timur, 2005, hlm 108

⁵¹ Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Erlangga, Jakarta 2009, hlm 867

⁵² Muhammad Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Edisi Terjemahan, Gema Insani Press, Jakarta 2001, hlm 7

Ada beberapa peristiwa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W berkenaan dengan hak politik masyarakat, misalnya ketika kaum Muslimin hendak melakukan Perang Uhud. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, beliau memunta pertimbangan mereka apakah sebaiknya tetap tinggal dan berlindung di Madinah atau keluar menyongsong pasukan kaum kafir. Ada sahabat yang setuju keluar dan menyongsong pasukan kafir, dan Nabi pun menerimanya.⁵³

Menurut fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.⁵⁴

Sudah menjadi cita-cita dan keinginan setiap orang, masyarakat atau bangsa di manapun di dunia ini untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera lahir dan bathin. Kondisi kehidupan yang demikian dapat tercapai apabila asas-asas keadilan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan hak dan kewajiban, ketaatan dan tolong menolong terhadap sesama terwujud dan terasa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵⁵ Asas-asas ini telah di sebut terdapat dalam piagam madinah

⁵³ Akram Dhiya, SI-Umuri, *Seleksi Sirah Nabawiyyah: Studi Kritis Muhadditsin Terhadap Riwayat Dhaif*, Darul Falah, Jakarta, hlm 408

⁵⁴ Nurholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014 hlm 4

⁵⁵ Mustafa Hilmi, *Nizam al-Khilafah Fi al-Fikri al-Islam*, (Edisi Terjemahan) 1999, Cet II, hlm 106

yang bertujuan untuk menciptakan kelompok-kelompok sosial madinah menjadi masyarakat yang bersatu dan bekerja sama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia atas dasar persamaan dan keadilan.

Asas-asas tersebut juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk dan perintah yang bersifat universal.⁵⁶ Al-Qur'an berperan untuk memberikan bimbingan komprehensif ke arah tingkah laku manusia yang baik, baik perorangan maupun kelompok dalam upaya menciptakan suatu kehidupan yang selaras di dunia dengan tujuan akhir kehidupan abadi dalam akhirat.

C. Dasar Hukum Hak Pilih Menurut Fiqh Siyasah

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S An-Nur: 55)⁵⁷

⁵⁶ Ibid, hlm 18.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta, Bumi restu, 2001 Q.S An-Nur: 55

Ayat tersebut menjelaskan bahwa khilafah adalah karunia bersama dari Tuhan dimana hak setiap muslim tidak melebihi dan tidak berkurang dari hak orang lain. Hak yang diberikan Islam terdapat hak politik seperti hak memilih dan dipilih adapun ketentuannya sebagai berikut: Ketentuan Memilih dan Dipilih dalam Islam, Pemerintah adalah wakil (khalifah) dan yang maha pencipta alam semesta, tanggung jawab ini tidak dipercayakan kepada individu atau keluarga atau sekelompok rakyat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat Islam. Metode yang dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk menjalankan negara adalah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Asy-Syura:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Q.S Asy-Syura:38)⁵⁸

Menurut prinsip ini, adalah hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilih nya dan dipilih oleh muslim lain untuk ikut serta dalam negara.⁵⁹ Dalam melibatkan diri secara langsung untuk ikut serta dalam urusan negara, maka sudah selayaknya pula seorang untuk menggunakan hak-hak politiknya.

⁵⁸ Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, Bumi restu, 2001 Q.S Asy-Syura : 38

⁵⁹ Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 20

Dalam urusan politik, Islam telah mensyari'atkan aturan yang paling sempurna dan adil. Islam mengajari umatnya segala yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi (muamalah) dengan sesama muslim atau dengan yang lainnya. Dalam peraturannya, Islam menggabungkan antara rahmah (kasih sayang) dengan kekuatan, menggabungkan antara sikap lemah lembut dengan kasih sayang terhadap semua makhluk sesuai kemampuan. Jika dengan lembut dan kasih sayang tidak bisa, maka kekuatan yang dipergunakan, namun dengan penuh hikmah dan keadilan, bukan dengan kedzaliman dan kekerasan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Q.S An-Nahl 90-91.⁶⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(90) dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

⁶⁰ Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, Bumi restu, 2001 Q.S An-Nahl : 90-91

sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(91)

Al-Qur'an mengatakan dalam QS. An-Nisa : 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ ٱللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ
ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلُورَا ءَوْ تُعَرِّضُوا فإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa : 135.)⁶¹

D. Hak Pilih Menurut Fiqh Siyasah

Mengenai hak memilih dan dipilih, Abd Al-Karim Zaidan mengatakan bahwa setiap rakyat suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam

⁶¹ *Ibid*, . An-Nisa : 135

mengelola semua urusannya sesuai dengan syariat Islam.⁶² Penentuan calon pemimpin merupakan salah satu masalah yang sangat penting dan harus diputuskan dengan musyawarah. Hak untuk memilih pemimpin ini dapat dipergunakan secara langsung atau melalui perwakilan oleh *ahl hal wa ak-'aql*, yakni tokoh – tokoh yang diteladani, dipatuhi dan dipercaya umat atau rakyat untuk mengatur segala urusannya.⁶³

Hak yang secara etimologi mengandung beberapa arti. Menurut Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang bermakna hak. Makna hak sebagai kepastian, ketetapan, benar, lawan dari *bathil*, dalam kamus *Lisan Al-Arab*, kata hak diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yakin, yang patut dan benar.⁶⁴ Segala tindakan dan urusan negara terhadap negara lain, tipu sulihat atau kelicikan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah kedisiplinan pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁶⁵

Menurut fiqh siyasah, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat

⁶² Abd al-Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Edisi Terjemahan, Bandung, 2000 hlm 52

⁶³ Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 54

⁶⁴ Jalaluddin Muhammad Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Cet 1, Logos, Jakarta, 2004, Hlm 9

⁶⁵ Abd, Muin Salim, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet II PT Rajagrafindo Persada, hlm 34

bersifat *debatable* (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.⁶⁶

Semua ulama dan fuqaha dari generasi ke generasi sepakat bahwa untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan atau *khilafah* merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Mereka menggunakan argumentasi fundamental dan esensial yang dinukilkan langsung dari *nash sharih al-Qur'an*, *al-Hadist* dan *kaidah-kaidah ushul fiqh*.⁶⁷

Perintah Allah SWT tersebut adalah perintah umum yang mencakup semua bentuk amanah dan syari'ah adalah amanah. Adapun hukum dan syari'ah adalah amanah. Disinilah letak wajibnya memilih seorang khalifah atau pemimpin. Syaikhul islam, Ibnu Taimiyah⁶⁸ berkata bahwa ayat tersebut merupakan kalam Allah yang sangat berharga dalam memberikan interpretasi tentang perlunya ketaatandan kepatuhan terhadap pemerintahan sesuaidengan karakteristik negara islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat Q.S. An –Nisa' 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁶⁶Nurholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014 hlm 4

⁶⁷ Ibn Ahmad Taqiyah, *Masadiru Al-Tasyri al-Islamy Muasisu Al-Kitab Al Tsaqafiyah*, Lebanon, 1999, hlm 126

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-fatawa*, Alih Bahasa ahmad Syaikh, muraja'ah, dan Lukman Hakim, *Kumpulan fatwa ibnu taimiyah tentang Amar Ma'ruf dan kekuasaan, siyasah syar'iyah dan Jihad Fisabilillah*, Darul Haq, Jakarta , 2005, hlm 256.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An –Nisa’ 59)⁶⁹

Bila diteliti dan ditelaah secara seksama dan komprehensif terlihat bahwa kedua ayat tersebut mencakup rukun-rukun sebuah khilafah atau pemerintahan yang terdiri dari :

1. Para pemegang kekuasaan hukum ialah *wullatul amr* (pemerintahan yang sah) sesuai petunjuk syar’i dan menjalankan hukum-hukum syari’at.
2. *Al-ummah* (masyarakat) mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat pada *ulil amr*.
3. Peraturan, perundang-undangan dan disiplin hukum yang berlaku yaitu syari’at agama islam

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Apabila hukum Islam di bandingkan dengan dengan pandangan atau pemikiran (hukum) barat (Eropa, terutama Amerika) tentang hak asasi manusia, akan kelihatan perbedaannya. Perbedaan itu terjadi karna pemikiran (hukum) Barat memandang hak asasi manusia semata-mata *antroposentis*, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat di pentingkan. Sebaliknya, pandangan hukum islam yang bersifat *teosentris*, artinya berpusat pada tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama

⁶⁹ Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, Bumi restu, 2001 Q.S An-Nisa:59

adalah Allah, Allah lah pusat segala sesuatu.⁷⁰ Oleh karna perbedaan pandangan itu, terdapat perbedaan pokok antara Deklarasi Hak-hak Asasi manusia yang di sponsori barat dengan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang di keluarkan oleh umat Islam, satu-satunya ukuran mengenai hak-hak asasi manusia, adalah syariat Islam.

Hak-hak yang di rumuskan dalam deklarasi itu, kebanyakan hak ekonomi, hak politik, seperti hak untuk mengutarakan pendapat secara bebas, tidak boleh bertentangan dengan asas-asas syariah. Dinyatakan pula bahwa semua individu sama di muka umum. Ketentuan lain adalah keluarga merupakan dasar masyarakat, wanita dan pria sama dalam martabat kemanusiaan. Hak atas hidup dijamin. Pekerjaan adalah hak individu yang di jamin oleh negara. Demikian juga hak atas pelayanan kesehatan, sosial dan kehidupan yang layak, di tegaskan pula tidak ada sanksi di tentukan dalam syariat atau hukum Islam.⁷¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁷⁰Ali Mohammad Daud, *Haji Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Rajawali Pers, 2015. Hlm 52

⁷¹*Ibid*, Hlm 59-60

BAB III

HAK PILIH POLRI TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 2 TAHUN 2002

E. Pengertian Hak Pilih Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak pilih diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dari lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis.⁷²

Hak pilih warga negara, baik hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.⁷³

Hak pilih sendiri merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Oleh karena itu setiap warganegara yang akan menggunakan hak tersebut dalam pemilihan umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum.

⁷² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003, hlm 339

⁷³ Electrolar Commission, *Everything You Need to Know About Voting Under MMP*, Terjemahan (Wellington : GP Publication), 1996, hlm 33

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara yang mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan hak pilihnya, apabila terdaftar sebagai pemilih.⁷⁴

Hak pilih warga negara merupakan bagian dari hak – hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi, dan merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan⁷⁵

Undang-Undang Dasar sebagai *constitutional right* menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (*konstitusionalisme*) terdiri dari:⁷⁶ (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Sri Soemantri menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:⁷⁷ (1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, (2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, (3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang

⁷⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 168

⁷⁵ Chaidir, Ellydar Dan Fahmi, *Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*, Total Media, Jakarta, 2002, hlm 10

⁷⁶ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 53

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 57

hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan (4) Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya.⁷⁸

Proses pelaksanaan pemilu, diharapkan bahwa warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung sebagaimana selayaknya seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Ia akan mengerti dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya.⁷⁹

Mempunyai hak pilih mempunyai arti sendiri sebagai warga negara Indonesia yang telah mencukupi umur untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah, pada kenyataannya hak pilih dalam pemilu tidak diperkenankan untuk digunakan oleh Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena mengingat dwifungsinya sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

⁷⁹ Henry Raymond & Singgih Agung, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 16-17

dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kuat

Pasal 28 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 secara tegas menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal tersebut adalah bukti bahwasannya hak pilih tidak digunakan oleh Polri, disebutkan secara tegas bahwa mereka tidak diperkenankan untuk melibatkan diri dalam pemilihan umum, bersikap netral dan boleh menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

F. Latar Belakang Lahirnya Undang –Undang No. 2 Tahun 2002

Perjalanan politik bangsa menuju kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.⁸⁰ Pola-pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Berikut sejarah dan politik hukum tentang hak pilih

⁸⁰ Nurhasanah, *Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 6, No 2 Juni 2005, hlm 215

Polri dapat dicermati dalam 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia yang meliputi Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Masa Reformasi.

1. Masa Orde Lama.

Momentum historis perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut menyatakan bahwa perlu berdirinya partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat tersebut berdampak luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu multi partai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk pemilihan parlemen, dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituante.⁸¹

Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955 masa orde lama. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata dan polisi diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan

⁸¹ *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm 52

kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman.

Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota angkatan bersenjata dan Polri ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa : “Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih dahulu.”⁸²

Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa, “Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek - pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.”⁸³

Pada masa orde lama anggota angkatan bersenjata dan Polri diberikan hak yang sama sebagai warga negara dalam ranah politik. Hal tersebut dikarenakan pada era revolusi kemerdekaan, angkatan bersenjata dan Polri senantiasa menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sehingga mereka sangat memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak memiliki tendensi kekuasaan.

⁸² Undang - Undang No. 7 Tahun 1953 tentang *Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat* Pasal 1 ayat (1).

⁸³ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

Hal tersebut bermakna bahwa pemilihan umum pertama di Indonesia pada 1955 telah mendekati demokratis, sebab berlangsung secara langsung, umum, bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan presentatif karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya anggota angkatan bersenjata dan kepolisian.⁸⁴

2. Masa Orde Baru.

Dimasa orde baru mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang - undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa: “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.”

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota ABRI dikarenakan Mengingat dwifungsi sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kuat dan sentosa. Karena itu maka anggota-anggota tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih,

⁸⁴ Jurnal Dinamika Hukum , *Analisis Terhadap Hak Pilih Polri Dalam Pemilihan Umum*, Vol I No. 1 januari 2011 , hlm 53

tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan.⁸⁵

Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸⁶

3. Masa Reformasi.

Posisi istimewa ABRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberikan tempat istimewa yaitu rezim orde baru. Reformasi kemudian memecahkan Polri kedalam dua wadah yang berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas Polri.

Reformasi Polri terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan keluarnya Tap MPR No. VI/2000 tentang pemisahan Polri serta Tap MPR No. VII/2000 tentang peran Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak Pilih anggota tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menentukan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan

⁸⁵ Setiajeng Kadarsih, "Analisis Terhadap Hak Pilih Polri", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 Januari 2011, hlm 4-6.

⁸⁶ Rahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, Dan Rosita Indrayati. "Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ). hlm. 4-5.

diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009.

Peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar terciptanya sikap profesional dari kedua institusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pada era reformasi Perihal ketidakikutsertaan Polri dalam penyelenggaraan Negara pada Era Reformasi yaitu di mulai pada:

- a) Pemilu Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Pasal 30.
- b) Pemilu Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 145, dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden Pasal 102.
- c) Pemilu pada Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 318, dan pada Undang - undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pasal 260.
- d) Berkenaan dengan Pemilu Legislatif 2014, anggota Polri ditegaskan tidak menggunakan haknya untuk memilih, diatur dalam Pasal 326

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Konsep netralitas politik diatas, pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak pilih dari Kepolisian Tentara Nasional Indonesia dan pasal 28 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Melihat sejarah dari pengaturan bagi Polri dibidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Namun apabila dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, maka peraturan pada masa reformasi mengalami kemunduran yang signifikan karena pada masa orde lama, angkatan bersenjata dan polisi diberikan hak memilih sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1953. Pada masa orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam raah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan di era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota Polri dihilangkan sehingga Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.⁸⁷

G. Kedudukan Polri Dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2002

⁸⁷ Jurnal Dinamika Hukum., *Op., Cit*, hlm 55

Pengaturan tentang hak pilih dalam perspektif pemerintahan, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan diatas nalurnya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan hak politik warga negara mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2) , Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3).⁸⁸ Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 turut memberikan pengakuan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam hal hak memilih dan dipilih yaitu terdapat pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Pasal 25 menyebutkan: Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.⁸⁹

⁸⁸ *Persandingan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2002, hlm 48-52

⁸⁹ <http://www.digilib.unila.ac.id/> *Tinjauan Pustaka Hak Konstitusional*, diakses, tanggal 12 Maret 2018, jam 22.30 WIB.

Pada pasal 28 Undang - Undang Kepolisian Negara No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota dan, atau pengurus partai politik, meskipun anggota kepolisian tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.⁹⁰

Dalam hal ini terjadi Pro dan Kontra, menurut Moh. Mahfud MD bahwa hak pilih anggota Polri adalah Hak Asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak memilih adalah Hak Asasi yang tertuang didalam konstitusi di dunia maupun Konvensi Internasional. Hak pilih itu adalah Hak Asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Dan mengatakan kita punya pengalaman pada Tahun 1955, saat itu Polri memilih dan tidak ada perpecahan. Perpecahan saat itu bukan karena Polri memilih tetapi banyak separatis di daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat.⁹¹

Menurut Amien Rais juga menyatakan keberatannya terhadap pemberian hak memilih dan dipilih. “ Polri merupakan alat negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada harus berada diatas kepentingan

⁹⁰ Undang – Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), Sinar Grafika, hlm 40

⁹¹ [Http://beritasore.com/2010/06/23/hakpilih-tni-Polri-hak-asasi-personal/](http://beritasore.com/2010/06/23/hakpilih-tni-Polri-hak-asasi-personal/), diakses, pada tanggal 12 maret 2018 jam 23.27 WIB.

bangsa sehingga para personel tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu untuk menjaga netralitas.⁹²

Melihat hal diatas mengenai hak pilih bagi Polri di bidang perpolitikan, maka terdapat makna pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan di pilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara. Didalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan “ Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”⁹³ Dan didalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.”⁹⁴

H. Hak Polri Memilih dan Dipilih Menurut Undang – Undang No. 2 tahun 2002

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaan

⁹² Bahtiar Effendy, *(Re)Politikasi Islam*, Mizan Media Utama, Bandung, hlm 336

⁹³ Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁹⁴ Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

HAM memberikan kewajiban kepada negara, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.⁹⁵ Sikap tersebut tampak dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana.

Berikut syarat - syarat dalam menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu:⁹⁶

1. Syarat Pemilih

- a. Pada waktu pendaftaran, pemilih sudah genap berusia 17 tahun atau sudah menikah.
- b. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- c. Tidak terganggu jiwanya atau ingatannya.
- d. Pemilih tidak sedang menjalani hukuman pidana kurungan yang diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Syarat Dipilih

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun keatas dan bertakwa kepada Tuhan YME.

⁹⁵ Marcus Priyo Gunarti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 19, Hlm 259

⁹⁶ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 168

- b. Dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpengalaman yang sederajat, dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Bukan bekas anggota terlarang PKI atau sejenisnya.
- e. Tidak sedang terganggu kejiwaannya atau ingatannya.
- f. Terdaftar dalam daftar calon.
- g. Bertempat tinggal dalam wilayah RI yang dibuktikan dengan KTP atau keterangan dari lurah atau kepala desa tentang alamat yang tetap.

Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap warganegara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tersebut diperbolehkan menggunakan hak memilih atau dipilih dalam pemilihan umum.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai pada Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.⁹⁷

Adapun bunyi keempat pasal dalam Undang – Undang Dasar 1945 tersebut adalah:

- (1) Pasal 27

⁹⁷ Maurice Duverger, *Party Politics And Pressure Groups A Comperative Introdution*, Bina Aksara, 1991, hlm 5

Ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

(3) Pasal 28D

Ayat (3) : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Pasal 28E

Ayat (3) : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.

Berbunyi :

(1) Pasal 1

Ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(2) Pasal 2

Ayat (1) : Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(3) Pasal 6A

Ayat (1) : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(4) Pasal 19

Ayat (1) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.

(5) Pasal 22C

Ayat (1) : Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Setiap pasalnya memuat bahwa setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.⁹⁸ Undang-Undang tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup, (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, (c) Hak mengembangkan diri, (d) Hak memperoleh keadilan, (e) Hak atas kebebasan pribadi, (f) Hak atas rasa aman, (g) Hak atas kesejahteraan, (h) Hak turut serta dalam pemerintahan, (i) Hak wanita, dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata

⁹⁸ A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 117

negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

Undang - Undang Hak Asasi Manusia khusus Pasal 43 berbunyi :

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.



BAB IV
PANDANGAN FIQH SIYASAH
TERHADAP UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2002
TENTANG HAK PILIH ANGGOTA POLRI DALAM PEMILU

**A. Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu Menurut Undang - Undang No. 2
Tahun 2002**

Pengaturan tentang hak pilih dalam perspektif pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas nalurnya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Hak pilih warga negara, baik hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak pilih juga merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Oleh karena itu setiap warganegara yang akan menggunakan hak tersebut dalam pemilihan umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.

Dalam hubungan antara dengan Polri terdapat ketentuan pembatasan perilaku bagi mereka yang bekerja dengan instansi negeri. Hubungan ini terjadi apabila seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada suatu perintah dari pemerintah.

Pasal 28 Undang – Undang No. 2 tahun 2002 telah menjelaskan bahwasannya anggota Polri tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, melibatkan diri dan bersikap netral, bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota dan, atau pengurus partai politik, meskipun anggota kepolisian tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ketentuan ini telah ditetapkan sejak masa orde baru berlandaskan konstitusional mengenai masuk nya militer kedalam politik, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut-nyebut adanya golongan dalam anggota lembaga permusyawaratan rakyat. Semua golongan dalam masyarakat berhak turut serta melaksanakan asas kedaulatan rakyat dan untuk itu militer pun dapat menjadi kekuatan sosial dan politik.

Pada sejarahnya penyelenggaraan pemilu Pertama Republik Indonesia pada masa orde lama dijelaskan bahwa anggota angkatan bersenjata dan Polri diberikan hak yang sama sebagai warga negara dalam ranah politik. Hal tersebut dikarenakan pada era revolusi kemerdekaan, angkatan bersenjata dan

Polri senantiasa menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sehingga mereka sangat memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak memiliki tendensi kekuasaan.

Pada Orde Baru Polri tidak mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu. Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota ABRI dikarenakan: mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada masa Reformasi, terkait dengan hak memilih dan dipilih Polri dalam proses politik diawali dengan keluarnya Tap MPR No. VI/2000 tentang pemisahan Polri serta Tap MPR No. VII/2000 tentang peran Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak Pilih anggota tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menentukan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009. Peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar terciptanya sikap profesional dari kedua institusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Mengenai hak pilih bagi Polri dibidang perpolitikan, maka terdapat makna pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara.

Didalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan “ Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.” Dan didalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan Dalam Pemilu tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

Padahal jelas dikatakan bahwa Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan hak politik warga negara mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2) , Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 turut memberikan pengakuan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam hal hak memilih dan dipilih yaitu terdapat pada Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) dan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 25 menyebutkan:

“Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.”

Dari sisi gagasan, sebagai warga negara anggota Polri secara individual juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. Jika dilihat dari kekhawatiran penyalahgunaan wewenang, tentu menjadi tugas kalangan politisi di parlemen untuk membuat aturan ini.

Secara historis, tidak ada kekhawatiran untuk memberikan hak pilih bagi anggota Polri, dimana pada pemilu pertama tahun 1955 Polri telah ikut berpartisipasi dalam arena politik dan tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi demokratisasi pada saat itu. Dalam pandangan HAM dan konstitusi, jelas bahwa hak ikut serta dalam pemilu merupakan *Fundamental right*, hak tersebut telah dilindungi oleh konstitusi yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Polri Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002

Islam berpendapat bahwa pemerintah adalah wakil (khalifah) dari Yang Maha Pencipta Alam Semesta, tanggung jawab ini tidak dipercayakan kepada individu atau keluarga atau sekelompok rakyat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat Islam, dan telah dijelaskan bahwa sebagai khalifah dimana didalam nya terdapat hak setiap muslim tidak melebihi dan tidak berkurang dari hak orang lain.

Dalam hal ini hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilih nya dan dipilih oleh muslim lain untuk ikut serta dalam negara. Dalam melibatkan diri secara langsung untuk ikut serta dalam urusan negara, maka sudah selayaknya pula seorang untuk menggunakan hak-hak politiknya.

Abd Al-Karim Zaidan mengatakan bahwa setiap rakyat suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai dengan syariat Islam.⁹⁹ Menurut beliau bahwa masalah kaum muslimin, utamanya yang penting diputuskan dengan jalan musyawarah. Penentuan calon pemimpin merupakan salah satu masalah yang sangat penting dan harus diputuskan dengan musyawarah. Hak untuk memilih pemimpin ini dapat dipergunakan secara langsung atau melalui perwakilan oleh *ahl hal wa ak-'aqd*, yakni tokoh – tokoh yang diteladani, dipatuhi dan dipercaya umat atau rakyat untuk mengatur segala urusannya.

Semua ulama dan fuqaha dari generasi ke generasi sepakat bahwa untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan atau *khilafah* merupakan kewajiban agama yang sangat agung. Mereka menggunakan argumentasi fundamental dan esensial langsung dari *nash sharih al-Qur'an*, *al-Hadist* dan *kaidah-kaidah ushul fiqh*.

Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik,

⁹⁹ Abd al-Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, hlm 52

seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, atau hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara.

Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, diantaranya :¹⁰⁰

7. Hak Memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan). Siapa yang terpilih di jabatan ini, maka ia adalah kepala negara, dalam *syara'* disebut *bai'ah*, dan hak *bai'ah* ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau perempuan.¹⁰¹

8. Hak Musyawarah

Hak musyawarah adalah hak bagi setiap muslim kepada seorang khalifah (kepala negara). Tiap muslim mempunyai hak untuk bermusyawarah di dalam urusan-urusan yang perlu di musyawarahkan oleh kepala negara.

9. Hak pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksud jika dia menyimpang dari kebenaran. Tahap pertama untuk meluruskannya ialah memberi nasehat dengan ikhlas.

¹⁰⁰ Ahmad Muflih Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 17

¹⁰¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cetakan I, Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2009, hlm 883.

10. Hak Pemecatan

Islam telah memberi hak kepada umat memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hak ini di tegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al- Hambali.

11. Hak Pencalonan dan Pemilihan

Hak pencalonan adalah seseorang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Apakah individu memiliki hak ini dalam pemerintahan Islam? Jawabnya boleh, karena Rasulullah telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika dia memohon menjadi wali di negeri (wilayah) Oman.

12. Hak Menduduki Jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh perangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan. Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak di capai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan didunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin di capai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tertentu.

Bukan hanya menjunjung tinggi hak umat Islam saja, Islam pun meletakkan hak-hak tertentu bagi non-muslim yang kebetulan hidup dalam lingkungan perbatasan suatu negara Islam dan hak-hak ini di pandang sebagai bagian dari konstitusi Islam. Konstitusi Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan “piagam madinah” adalah sebutan dari shahifat (berarti lembaran tertulis) dan kitab yang dibuat oleh Nabi. Kata “piagam” berarti surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu.

Hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan melalui hak dalam pemberian suara, hak memilih dalam pemilihan, dan kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul. Landasan dasar hak ini dalam Islam yang di kehendaki oleh Allah SWT dan telah di jelaskan oleh rasulullah adalah berkumpul pada enam asas yaitu : kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.

Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal yang terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak pilih warga negara, baik hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 28 Undang – Undang No. 2 tahun 2002 telah menjelaskan bahwasannya anggota Polri tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, melibatkan diri dan bersikap netral, bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan, dan dilarang menjadi anggota dan, atau pengurus partai politik.
2. Dalam Pandangan fiqh siyasah pembatasan hak pilih bagi anggota Polri tidak sesuai dengan prinsip yang ada karena menurut ketentuan yang ada rakyat suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai dengan syariat Islam. setiap warga negara juga berhak untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan melalui hak dalam pemberian suara, hak memilih dalam pemilihan, dan

kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pemaparan dari bab-bab yang telah penulis jelaskan diatas maka saran yang penulis ajukan yaitu :

Pertimbangan memberikan hak pilih bagi Polri harus dicermati dengan matang dan bijaksana, mengingat fungsi dari Polri memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakat sipil lainnya, misalnya cara menggunakan senjata api, seni beladiri, keahlian intelligen, dan lain-lain.

Pada dasarnya, semua kebijakan dan wacana tersebut hendaklah dipertimbangkan bukan hanya karena kepentingan politik dan hukum semata, namun dilaksanakan demi kemajuan dan pendewasaan pembangunan demokratisasi di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*
- Abd, Muin Salim, *Fiqih Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an, Cet II PT Rajagrafindo Persada*
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Ahmad Muflih Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Akram Dhiya, SI-Umuri, *Seleksi Sirah Nabawiyyah: Studi Kritis Muhadditsin Terhadap Riwayat Dhaif*, Darul Falah, Jakarta
- Ali As-Salus, *Imaman dan Khalifah Dalam Tinjauan Syar'i*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Ali Mohammad Daud, *Haji Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Jakarta, Bumi Restu, 2001
- Bahtiar Effendy, *(Re)Politisasi Islam*, Mizan Media Utama, Bandung
- Chaidir, Ellydar Dan Fahmi, *Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)*, Total Media, Jakarta, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Electrolar Commission, *Everything You Need to Know About Voting Under MMP*, Terjemahan (Wellington : GP Publication), 1996
- Fariq Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Sinar Grafika 2005
- Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius, 1993

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007

Hasnati, "Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 3 No.1 Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

HenryRaymond & Singgih Agung, *Politik kewarganegaraan: Landasan Redemokrasi di Indonesia*, Erlangga Jakarta, 1999

Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Erlangga, Jakarta 2009

I Ketut Putra Erawan, *Logika Perubahan dan Keterampilan Sistem Pemilihan Umum Bagi Indonesia 2009*, Jakarta

Ibn Ahmad Taqiyah, *Masadiru Al-Tasyri al-Islamy Muasisu Al-Kitab Al Tsaqafiyah*, Lebanon, 1999

Ibnu Al-Jauzi, *Munaqih Umar Ibn Al-Khattab, Tahqiq: Zainab Ibrahim Al-Qaruth*, (Edisi Terjemahan), cet I

Ibnu Syarif, *Hak-Hak Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

Ibnu Taimiyah, Majmu' al-fatawa, Alih Bahasa ahmad Syaikh, muraja'ah, dan Lukman Hakim, *Kumpulan fatwa ibnu taimiyah tentang Amar Ma'ruf dan kekuasaan, siyasah syar'iyah dan Jihad Fisabilillah*, Darul Haq, Jakarta, 2005,

J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Jalaluddin Muhammad Ibnu Manzbur, *Lisan Al-Arab*, Cet 1, Logos, Jakarta, 2004,

Jurnal Dinamika Hukum, *Analisis Terhadap Hak Pilih Polri Dalam Pemilihan Umum*, Vol I No. 1 januari 2011

Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma, 2005

M Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta,

Marcus Priyo Gunarti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 19

Maurice Duverger, *Party Politics And Pressure Groups A Comperative Introdution*, Bina Aksara, 1991

Muhammad Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Edisi Terjemahan, Gema Insani Press, Jakarta 2001

Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cetakan I, Pustaka As-Sunnah, Jakarta, 2009

Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jilid II, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Gaya Media Pratama*, Jakarta 2007

Munawir Syazili, *Islam dan Tata Negara*, cet V, UI Press, Jakarta 1990

Mustafa Hilmi, *Nizam al-Khilafah Fi al-Fikri al-Islam*, (Edisi Terjemahan) 1999, Cet II

Nurhasan, "Pasang surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Ligitasi*, Vol. 6 No.2, Juni 2005, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasudan

Nurholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014

Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Persandingan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2002

Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007

Rahmat Maulana Winata, Iwan Rachmad, Dan Rosita Indrayati. "Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009

Setiajeng Kadarsih, *“Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri”*, *Jurnal Dinamika Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 Januari 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 1 , Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Todung Mulya Lubis, *“Menegakan Hak asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi”*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39 No.1, Januari-Maret 2009, Jakarta. Fakultas: Hukum Universitas Indonesia

Undang - Undang No. 7 Tahun 1953 tentang *Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat* Pasal 1 ayat (1).

Undang – Undang Kepolisian Negara (UU RI No. 2 Tahun 2002), Sinar Grafika, hlm 40

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Tahun 1999, Pasal 43

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco, Bandung 1971

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003

[Http://beritasore.com/2010/06/23/hakpilih-tni-polri-hak-asasi-personal/](http://beritasore.com/2010/06/23/hakpilih-tni-polri-hak-asasi-personal/), diakses, pada tanggal 12 maret 2018 jam 23.27 WIB.

<http://www.digilib.unila.ac.id/> *Tinjauan Pustaka Hak Konstitusional*, diakses, tanggal 12 Maret 2018, jam 22.30 WIB.

